

Judul : Parpol Mulai Simulasikan Arah Perubahan Kebijakan
Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Parpol Mulai Simulasikan Arah Perubahan Kebijakan

Masukan publik menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menyusun kajian dan menyimulasikan arah perubahan yang akan diatur dalam RUU Pemilu.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik mulai menyusun kajian dan simulasi terkait arah perubahan kebijakan pemilu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. Masukan dari publik, termasuk akademisi dan pegiat pemilu yang diundang dalam rapat Komisi II DPR, disebut akan menjadi bahan pertimbangan partai, bahkan berpotensi digunakan untuk memperkuat argumentasi atas simulasi yang sedang maupun akan disusun.

"Jadi soal masukan ambang batas, sistem proporsional terbuka atau tertutup, dan sebagainya itu nanti kami jadikan catatan. Prosesnya mungkin masih panjang, bisa dua sampai tiga bulan ke depan," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dede Yusuf, Kamis (22/1/2026).

Komisi II DPR mulai menerima masukan terkait desain dan persoalan pemilu yang akan dijadikan bahan dalam revisi UU Pemilu pada Selasa (20/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Sejumlah akademisi, antara

lain, Kepala Departemen Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah, diundang untuk menyampaikan pandangan.

Dede mengatakan, pembahasan RUU Pemilu saat ini masih berada pada tahap awal peninjauan masukan. Setiap Selasa, Komisi II DPR membuka ruang bagi akademisi, pengamat, dan publik untuk menyampaikan pandangan mereka dalam forum rapat dengar pendapat umum.

Partai Demokrat mulai melakukan kajian internal, tetapi belum sampai pada pengambilan keputusan atas isu-isu krusial dalam revisi UU Pemilu.

Saat ini, Partai Demokrat tengah menyaring berbagai masukan dari publik, akademisi, dan pegiat pemilu untuk memastikan seluruh pandangan tersebut menjadi pertimbangan dalam perumusan kajian yang lebih menyeluruh.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

(PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan, PKS tengah melakukan kajian internal, khususnya terkait ambang batas parlemen.

Menurut Mardani, ambang batas parlemen ideal berada pada kisaran 3-4 persen. Angka tersebut dinilai cukup untuk menjaga keterwakilan warga di DPR sekaligus tetap mendukung efektivitas sistem keparlamentan.

"Angka di bawah 3 persen membuat konsolidasi lebih kompleks karena bisa ada 10 sampai 12 partai di parlemen. Sementara angka di atas 4 persen berpotensi membuat banyak suara terbuang. Jadi, lebih baik konstan saja, tidak perlu diturunkan," kata Mardani.

Basis data dan analisis

PKS menilai masukan dari sejumlah narasumber yang telah diundang dalam RDP Komisi II DPR memiliki bobot kuat karena disampaikan berbasis data dan analisis. Pandangan akademisi dan pegiat pemilu menjadi rujukan penting bagi partai dalam menyusun sikap.

Wakil Ketua DPR Sufni Daud Ahmad menegaskan, hingga saat ini Partai Gerindra masih berada pada tahap simulasi dan pengkajian internal terkait arah perubahan kebijakan pemilu ke depan. Keputusan resmi partai akan disampaikan setelah seluruh proses kajian tersebut rampung.

Gerindra akan mencermati seluruh masukan yang berkembang, baik dari publik maupun dari proses pembahasan di DPR. Seluruh pandangan terkait ambang batas parlemen dan isu-isu lain dalam RUU Pemilu perlu didalami secara komprehensif sebelum partai menentukan sikap resmi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay berpendapat, ruang-ruang aspirasi pergantian kekuatan politik yang terbuka dan dikehendaki masyarakat bergerak secara alamiah. Oleh sebab itu, simulasi partai politik harus dilakukan dengan mempertimbangkan hal tersebut.

"Secara alamiah, perolehan

kursi di setiap dapil (daerah pemilihan) itu sudah memiliki ambang batas tersendiri, dan tidak perlu direkayasa. Jadi, yang berkuasa harus tetap berkompetisi secara terbuka melalui pemilu yang adil dan bersih," kata Hadar.

Ia mengingatkan, jangan membuat sistem yang terlalu membatasi dan akhirnya hanya bisa dikuasai oleh kekuatan-kekuatan elite. Sebab, hal itu belum tentu dikehendaki masyarakat.

Hadar yang menjabat sebagai Komisiner Komisi Pemilihan Umum 2012-2017 berpandangan, suara publik terhadap partai politik pilihannya harus dihargai. Akan sangat disayangkan jika pilihan sebagian masyarakat harus kandas hanya karena tidak lolos ambang batas rekayasa tersebut.

"Jadi, suara-suara mereka semua dihitung. Satu kursi itu pun tetap perjuangan dari partai politik dan calon (calon legislatif), yang kemudian masyarakat sudah memberikan mandatnya menjadi wakil rakyat. Nah, itu harus kita hargai," ujar Hadar. (RTG/BOW)